

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG**

**TAHUN 2023 - 2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN BATANG**

Jl.Urip Sumoharjo No.13 Telp (0285) 4493081 Batang

**Tahun 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya sehingga perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang tahun 2023-2026 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Batang dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang perencanaan, tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.

Selanjutnya Rencana Strategis yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian tujuan DPMPTSP hingga tahun 2026 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Renstra ini, terutama kepada seluruh staf DPMPTSP yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Renstra dapat dilaksanakan dengan baik.

Batang, Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BATANG



**WAHYU BUDI SANTOSO** S.Sos, M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701017 199003 1 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
 <b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu...8	
2.3 Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2017 - 2021 .....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD .....	20
 <b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan .....	24
3.2 Telaahan Renstra .....	26
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup.....	27
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan 1 .....29

4.2. Tujuan 2 ..... 30

**BAB V STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN ..... 39**

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN**

A. Belanja Langsung ..... 43

B. Belanja Tidak Langsung .....44

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG**

URUSAN .....48

**BAB VIII PENUTUP .....49**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Kepangkatan .....	9
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Batang .....	11
Tabel 2.3 Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2021 .....	15
Tabel 2.4 Perkembangan Pelayanan Perijinan Kab Batang Tahun 2017 – 2021 .....	16
Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tahun 2017 – 2021 .....	19
Tabel 2.6 Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Perijinan Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2021 .....	20
Tabel 2.7 Pencapaian Target Pendapatan Retribusi Perizinan .....	20
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Batang .....	22
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	28
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah.....	33
Tabel 4.2 Sasaran Dan Program Jangka Menengah .....	34
Tabel 4.3 Program Dan Kegiatan Jangka Menengah .....	35
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	40
Tabel 6.1 Rencana dan Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Batang .....	45
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 – 2026 .....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

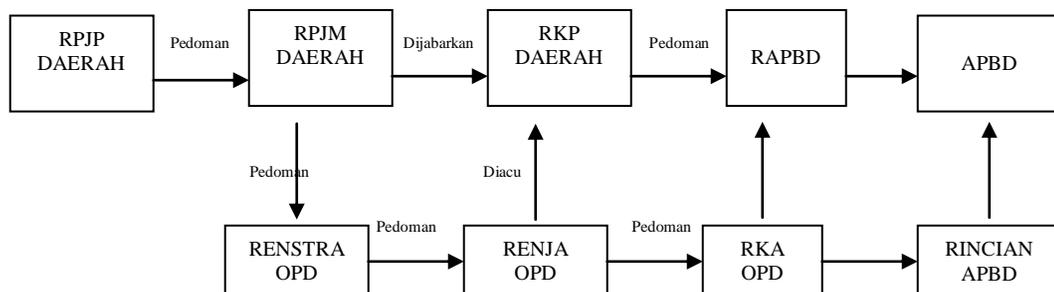
### 1.1 Latar Belakang

Dalam paradigma pembangunan dewasa ini, usaha untuk menarik investasi dihadapkan pada permasalahan yang sangat kompleks, yaitu antara lain tingkat persaingan antar daerah yang sangat tajam, tuntutan peningkatan pelayanan, stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum, ketenagakerjaan serta krisis ekonomi global yang berdampak terhadap minat investasi di suatu daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2023 - 2026 adalah merupakan bagian dari Renstra Kabupaten Batang yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul guna mendukung **“Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan”**.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Kabupaten Batang telah menetapkan kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pelaksanaan lebih lanjut Pembangunan Daerah Kabupaten Batang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini substansi penyusunannya adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan dan penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang.

Dokumen Rencana Strategis ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang selanjutnya dipergunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja (Renja) OPD dan dijabarkan dalam dokumen anggaran seperti RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang setelah mendapat pengesahan dari DPRD menjadi APBD Kabupaten Batang

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang untuk tahun 2023–2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian dan Tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 30).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2023 - 2026 ini dimaksudkan sebagai

acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang pada periode 2023 - 2026. Selain itu Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan program dan kegiatan maupun tugas sehari-hari, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan dibidang Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, melalui keterpaduan pelaksanaan, sehingga dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang tahun 2023 - 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang yaitu terdiri dari :

- BAB I** PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- BAB II** GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi serta Sumber daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.
- BAB III** PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menyajikan identifikasi permasalahan, telaahan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta isu-isu strategis.

- BAB IV** TUJUAN DAN SASARAN, menguraikan tentang tujuan dan sasaran OPD, untuk mencapai tujuan sesuai dengan Tupoksi dan arah kebijakan dalam RPJM.
- BAB V** STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, menguraikan tentang strategis dan arah kebijakan yang diambil OPD untuk mencapai tujuan sesuai dengan Tupoksi dan arah kebijakan RPJM.
- BAB VI** RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi Rencana Program dan Kegiatan, indicator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dilingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun ke depan.
- BAB VII** KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN , berisi target-target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang akan menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan kinerja.
- BAB VIII** PENUTUP merupakan penutup dari dokumen rencana strategis dan harapan kepada semua pihak yang berkepentingan agar menjadikan renstra ini sebagai penunjuk arah dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan bidang penanaman modal periode 2023 - 2026.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

##### **1. Tugas dan Fungsi Unit Kerja**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Serta Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal, serta system informasi pelayanan pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan PTSP;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan umum bidang penanaman modal dan PTSP;
- c. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang penanaman modal PTSP;
- d. Pembinaan umum dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. Penyelenggaraan pelayanan semua perizinan dan non perizinan;
- f. Menyelenggarakan penghitungan, penetapan, dan pemungutan retribusi perizinan dan non perizinan;
- g. Pengkoordinasian pengaduan perizinan dan non perizinan;
- h. Pembinaan fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal PTSP;
- i. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang penanaman modal PTSP;
- j. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup DPMPTSP;
- k. Penyelenggaraan ketatausahaan DPMPTSP;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2. Organisasi dan Tata Kerja**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, terdiri atas ;
  - a. Subbag. Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbag. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Penanaman Modal, terdiri atas;
  - a. Seksi Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal; dan
  - b. Analis Kebijakan Ahli Muda
- 4) Bidang Perijinan, terdiri atas:
  - a. Seksi Verifikasi dan Validasi Perizinan;
  - b. Seksi Pemrosesan dan Penetapan Perizinan; dan
  - c. Analis Kebijakan Hukum.
- 5) Bidang Sistem Informasi dan Pelayanan Pengaduan, terdiri atas:
  - a. Pranata Komputer Ahli Muda; dan
  - b. Seksi Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

### **1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)**

Jumlah SDM yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang pada tahun 2022 sebanyak 54 (Lima puluh empat) orang terdiri dari 21 (dua puluh satu ) orang PNS dan 2 (dua) orang CPNS serta 31 orang tenaga outcorcing, dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

- Pasca Sarjana : 5 orang
- Sarjana : 29 orang
- D-3 : 2 orang
- SMA : 16 orang
- SMP : 2 orang

b. Berdasarkan Status Kepegawaian :

- PNS : 21 orang

- CPNS : 2 orang
- Outcorcing : 31 orang

c. Berdasarkan Kepangkatan :

**Tabel 2.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Kepangkatan**

<b>Pangkat</b>	<b>Golongan</b>	<b>Jumlah</b>
Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
Pembina Tingkat I	IV/b	- Orang
Pembina	IV/a	2 Orang
Penata Tingkat I	III/d	5 Orang
Penata	III/c	4 Orang
Penata Muda Tingkat I	III/b	3 Orang
Penata Muda	III/a	2 Orang
Pengatur Tk I	II/d	4 Orang
Pengatur	II/c	1 Orang
Pengatur Muda Tk I	II/b	1 Orang
Pengatur Muda	II/a	- Orang
<b>Jumlah</b>		<b>23 Orang</b>

Dengan kondisi kepegawaian tersebut diatas, maka masih perlu adanya tambahan pegawai terutama yang berlatar belakang pendidikan komputer, akuntansi, arsiparis maupun teknik.

c. Berdasarkan Eselon :

- Eselon II/b : 1 orang
- Eselon III/a : 1 orang
- Eselon III/b : 3 orang
- Eselon IV/a : 9 orang
- Eselon IV/b : - orang

Dengan kondisi tersebut diatas, maka jabatan masih ada yang kosong Seksi Pemrosesan dan Penetapan Perizinan pada Bidang Perijinan .

d. Penjenjangan :

- 1) Diklatpim II : - orang
- 2) Diklatpim III : - orang
- 3) Diklatpim IV : 6 orang

Dengan kondisi tersebut diatas, maka masih ada pejabat yang belum mengikuti Diklatpim II sebanyak 1 (satu), diklatpim III sebanyak 4 (empat) orang, diklatpim IV sebanyak 6 (enam) orang.

## **2. Kondisi Sarana**

- i. Inventaris Barang Tidak Bergerak.
  1. Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang terletak di Jl. Urip Sumoharjo Nomor 13 Kab. Batang.
- ii. Inventaris Barang Bergerak.
  1. Alat Kantor : Meja, Kursi, Almari, Mesin Ketik, Komputer, dll.
  2. Alat Angkutan : Mobil, Kendaraan roda 2.

(Daftar Inventaris sebagaimana terlampir)

## **3. Kondisi Keuangan**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, pada setiap tahun telah dialokasikan anggaran belanja sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kabupaten Batang, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPSTP**  
**Kabupaten Batang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000000	3700000	1600000	3000000	1987500	2610615	3617000	1599000	2655000	1980000	87,02	99,76	99,94	88,5	99,62	2657500	2492323
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	151700000	165255000	133594500	246150000	348921740	150176160	160694772	130919548	232478171	338782145	99	97,24	98	94,45	97,09	209124248	202610159,2
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	-	371553936	-	-	-	-	369481860	-	-	-	-	99,44	371553936	369481860
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	28350000	31543750	17424000	24500000	161500000	27752050	31543186	16068600	22643951	161495820	97,89	100	92,22	92,42	100	52663550	51900721,4
Penyediaan jasa kebersihan kantor	132597900	198441000	122424000	162074000	-	132230548	198203900	122424000	159974000	-	99,72	99,88	100	98,7	-	153884225	153208112
Penyediaan alat tulis kantor	40000000	109138500	42800000	42144000	49660000	40000000	109138500	42800000	42144000	49660000	100	100	100	100	100	56748500	56748500
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48028000	54996000	21120000	17950000	85660000	48028000	54996000	21120000	17950000	85241600	100	100	100	100	99,51	45550800	45467120
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16100000	17980000	5280000	5280000	6975600	16100000	17980000	5280000	5280000	6975000	100	100	100	100	99,99	10323120	10323000
Penyediaan peralatan rumah tangga	8500000	6234000	2640000	13500000	23482000	8500000	6234000	2640000	13500000	23308800	100	100	100	100	99,26	10871200	10836560
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5520000	6900000	3696000	3696000	3696000	5520000	6875000	3696000	3696000	3696000	100	99,64	100	100	100	4701600	4696600
Penyediaan makanan dan minuman	34000000	40577000	15840000	92602000	79265000	34000000	40577000	15840000	71925000	79229000	100	100	100	77,67	99,95	52456800	48314200
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	150530000	135500000	98469760	74511649	50908300	150490000	135496700	98469750	69692000	50882950	99,97	100	100	93,53	99,95	101983941,8	101006280
Penyediaan jasa pengamanan kantor	178000000	308560000	151200000	180600000	-	178000000	308560000	151200000	174300000	-	100	100	100	96,51	-	204590000	203015000
Pengelolaan keuangan SKPD	39500000	39875000	37000000	45800000	-	39500000	39871550	37000000	45800000	-	100	99,99	100	100	-	40543750	40542887,5
Pengadaan kendaraan dinas/	303000000	-	-	-	-	292060000	-	-	-	-	96,39	-	-	-	-	303000000	292060000

operasional																		
Pengadaan peralatan gedung kantor	116000000	259025000	786682500	411000000	20181860	113998600	258812000	760185500	384555700	20020000	98,27	99,92	96,63	93,57	99,2	318577872	307514360	
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	778900000	-	-	-	-	772133200	-	-	-	-	99,13	-	778900000	772133200	
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	289450000	300550000	52958400	70000000	0	247438000	299494000	52398160	69976950	0	85,49	99,65	98,94	99,97	0	142591680	167326777,5	
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	161450000	154240000	137817900	150474000	-	157169500	154239785	137809849	139536249	-	97,35	100	99,99	92,73	-	150995475	147188845,8	
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	25000000	66950000	18480000	48850000	32500000	25000000	66950000	18480000	48850000	32500000	100	100	100	100	100	38356000	38356000	
Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya	20160000	29904000	0	18000000	-	20160000	29904000	0	18000000	-	100	100	0	100	-	22688000	22688000	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8500000	9500000	6600000	7500000	6000000	8500000	9500000	6600000	7500000	6000000	100	100	100	100	100	7620000	7620000	
Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja yang memiliki embrio usaha	168205900	-	-	-	-	167892500	-	-	-	-	99,81	-	-	-	-	168205900	167892500	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	-	-	-	-	10050000	-	-	-	-	10050000	-	-	-	-	100	10050000	10050000	
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	-	-	-	-	211150000	-	-	-	-	209060000	-	-	-	-	99,01	211150000	209060000	
Penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	-	-	-	-	48050500	-	-	-	-	44675500	-	-	-	-	92,98	48050500	44675500	
Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	374415450	-	-	-	-	344231660	-	-	-	-	99,08	374415450	344231660	
Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	-	-	-	-	227262000	-	-	-	-	192605400	-	-	-	-	84,75	227262000	192605400	
Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	-	-	-	-	62352534	-	-	-	-	61892600	-	-	-	-	99,26	62352534	61892600	
Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	50820000	-	-	-	-	18225800	-	-	-	-	35,86	50820000	18225800	
Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	-	-	-	-	94380000	-	-	-	-	15956300	-	-	-	-	16,91	94380000	15956300	

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	-	223865000	-	-	-	-	222251000	-	-	-	-	99,28	-	-	-	223865000	222251000
Monitoring evaluasi dan pelaporan	25000000	21600000	-	-	-	20302000	21585000	-	-	-	81,21	99,93				23300000	20943500
Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	-	-	-	-	78485000	-	-	-	-	76173300	-	-	-	-	97,05	78485000	76173300
Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (DBHCT)	400000000	319530000	-	-	-	380744290	317880000	-	-	-	95,19	99,48	-	-	-	359765000	349312145
Pelatihan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau atau daerah penghasil bahan baku industri tembakau (DBHCT)	1000000000	922640000	-	-	-	999984050	865525150	-	-	-	100	93,81	-	-	-	961320000	932754600
Penyebarluasan informasi bursa pencari kerja	169200000	282065000	-	-	-	169175500	279824000	-	-	-	99,99	99,21	-	-	-	225632500	224499750
Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	360000000	262770000	-	-	-	358615200	259120000	-	-	-	99,62	98,61	-	-	-	311385000	308867600
Padat Karya	1639453500					1572190400					95,9					1639453500	786095200
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	36000000	52407000	-	-	-	34855000	52407000	-	-	-	96,82	100	-	-	-	44203500	43631000
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	97500000	105250000	-	-	-	97212500	105137500	-	-	-	99,71	99,89	-	-	-	101375000	101175000
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	142500000	96672000	-	-	-	141696000	96322000	-	-	-	99,44	99,64	-	-	-	119586000	119009000
Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	35000000	-	-	-	-	34825000	-	-	-	-	99,5	-	-	-	-	35000000	34825000
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan		33000000	-	-	-	-	32980000	-	-	-	-	99,94	-	-	-	33000000	32980000

Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	75000000	29839000	-	-	-	74939600	29839000	-	-	-	99,92	100	-	-	-	52419500	116328600
Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah	28200000	27000000	34650000	-	-	28135000	26775000	34650000	-	-	99,77	99,17	100	-	-	29950000	27455000
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah	62200000	71800000	59000000	13472000	-	62200000	71700000	59000000	9620000	-	100	99,86	100	71,41	-	51618000	50630000
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	56400000	67725000	54374600	32834500	-	56390000	66673250	52793000	18079000	-	99,98	98,45	97,09	55,06	-	52833525	48483812,5
Penyelenggaraan pameran investasi	138180000	164200000	150158000	9785000	-	137168000	164169394	150158000	9185000	-	99,27	99,98	100	93,87	-	115580750	115170098,5
Memfasilitasi dan kordinasi kerjasama dibidang	-	-	-	23545000	-	-	-	-	7810000	-	-	-	-	33,17	-	23545000	7810000
Pengembangan sistem informasi penanaman modal	51700000	65000000	46860000	80000000	-	50346000	11999500	46830000	71432600	-	97,38	18,46	99,94	89,29	-	60890000	45152025
Sosialisasi pelayanan terpadu satu pintu	-	-	-	102100000	-	-	-	-	101600000	-	-	-	-	99,51	-	102100000	101600000
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	-	-	-	21531634	-	-	-	-	21387000	-	-	-	-	99,33	-	21531634	21387000
Pelayanan pengaduan masyarakat	-	-	-	36000000	-	-	-	-	31605300	-	-	-	-	87,78	-	36000000	31605300
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	81820000	103515400	64848960	-	-	78950735	97703400	63881500	-	-	96,49	94,39	98,51	-	-	83394786,67	80178545
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	331820000	389300000	484150800	380748500	-	320622000	389129000	482251800	369838050	-	96,63	99,96	99,61	97,13	-	396504825	298000700
Kajian Potensi Sumber daya yang terkait dengan investasi	80652000	97550000	90245000	-	-	79802000	96782088	89065000	-	-	98,95	99,21	98,69	-	-	89482333,33	88549696

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2017- 2022, jumlah belanja langsung dan tidak langsung mengalami kenaikan dan penurunan. Untuk realisasi anggaran dari tahun 2017 sampai 2022 mengalami penurunan. Sedangkan jika dilihat dari rasio antara realisasi dan anggaran, setiap tahun mengalamipenurunan.

## 2.3. Kinerja Pelayanan Skpd Tahun 2017 - 2021

### 1. Realisasi Investasi

Pertumbuhan investasi Kabupaten Batang secara kumulatif tumbuh sangat fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 38,43 % per tahun. Hal itu dapat dilihat dari tabel pertumbuhan realisasi investasi di bawah ini :

**Tabel 2.3 Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2021**

No	Tahun	Realisasi Investasi (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
1.	Tahun 2017	421,09	0,58
2.	Tahun 2018	67.270,08	1.587,52
3.	Tahun 2019	14.707,54	-78,14
4.	Tahun 2020	9.082,78	- 38,24
5.	Tahun 2021	7.560,06	-0,167

D

Dari kegiatan investasi akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kabupaten Batang. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 6,467 orang.

### 2. Pelayanan perizinan

Salah satu tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah memberikan pelayanan perizinan baik izin dalam rangka penanaman modal maupun pelayanan izin usaha dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*). Dengan sistem ini akan terwujud pelayanan yang efektif, efisien serta transparan. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Batang kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 terdapat 75 (tujuh puluh lima) jenis ijin.

Rata-rata pelayanan perizinan setiap tahun sebanyak 3.000 ijin. Adapun perkembangan pelayanan perizinan selama tahun 2017 s.d 2021 adalah sebagai berikut ;

**Tabel 2.4 Perkembangan Pelayanan Perijinan Kab Batang Tahun 2017 – 2021**

NO	JENIS PELAYANAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendaftar Penanaman Modal	0	37	37	0	37
2	Izin Prinsip Penanaman Modal	44	61	61	44	61
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
4	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	0	0	0	0	0
5	Izin Usaha	0	0	0	0	0
6	Izin Usaha Perluasan	0	0	0	0	0
7	Izin Usaha Perubahan	0	0	0	0	0
8	Izin Usaha Pengabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger)	0	0	0	0	0
9	Ijin Lokasi	11	9	9	52	9
10	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	221	265	265	242	265
11	Ijin Gangguan ( HO )	276	0	0	276	0
12	Ijin Usaha Industri (IUI)	4	2	2	4	2
13	Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	246	167	167	246	167
14	Ijin Perluasan Industri (IPI)	0	0	0	0	0
15	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	237	186	186	237	186
16	Tanda Daftar Industri (TDI)	26	15	15	26	15
17	Tanda Daftar Gudang (TDG)	10	10	10	10	10
18	Ijin Reklame	42	50	50	42	50
19	Ijin Penambangan (dihapus)	0	0	0	0	0
20	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	74	38	38	74	38
21	Ijin Usaha Angkutan	6	3	3	6	3
22	Ijin Trayek	719	782	782	719	782
23	Surat Persetujuan Ijin Trayek (SPIT)	0	0	0	0	0
24	Pembaharuan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)	0	0	0	0	0
25	Izin Usaha Rice Mill	0	0	0	0	0
26	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	12	9	9	12	9
27	Izin Pengusahaan Air Tanah (dihapus)	0	0	0	0	0
28	Izin Pemakaian Air Tanah (dihapus)	0	0	0	0	0
29	Surat Izin Usaha Perikanan	0	0	0	0	0

30	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	0	0	0	0	0
31	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	0	0	0	0	0
32	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	87	95	95	87	95
33	Izin Perpanjangan IMTA	19	37	37	19	37
34	Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LKPS)	1	7	7	1	7
35	Izin Mempergunakan Ketel Uap	0	0	0	0	0
36	Izin Menggunakan Tangkin Timbul	0	0	0	0	0
37	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah	0	0	0	0	0
38	Izin Pengumpulan Uang dan Barang	0	0	0	0	0
39	Izin Mengadopsi Anak	0	0	0	0	0
40	Izin Operasional Panti	0	0	0	0	0
41	Izin Rumah Sakit Tipe C	1	0	0	1	0
42	Izin Rumah Sakit Tipe D	0	0	0	0	0
43	Izin Klinik Pratama	0	7	7	0	7
44	Izin Klinik Utama	0	0	0	0	0
45	Izin Apotek	15	12	12	15	12
46	Izin Toko Obat	0	0	0	0	0
47	Izin Optik	0	3	3	0	3
48	Izin Pengobatan Tradisional	2	2	2	2	2
49	Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	62	40	40	62	40
50	Izin Praktek Dokter	142	124	124	142	124
51	Izin Praktek Bidan	23	638	638	23	638
52	Izin Kerja Bidan	74	1	1	74	1
53	Izin Praktek Perawat	42	245	245	42	245
54	Izin Kerja Perawat	274	0	0	274	0
55	Izin Praktek Apoteker	26	26	26	26	26
56	Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	94	36	36	94	36
57	Izin Kerja Analis Kesehatan	40	42	42	40	42
58	Izin Kerja Refraksionist Optisien	4	2	2	4	2
59	Izin Kerja Tenaga Gizi	4	19	19	4	19
60	Izin Pendirian TK Negeri	0	0	0	0	0
61	Izin TK yang diselenggarakan oleh masyarakat	1	3	3	1	3

62	Izin Pendirian SD Negeri	0	0	0	0	0
63	Izin Pendirian SD yang diselenggarakan oleh masyarakat	1	1	1	1	1
64	Izin SMP Negeri	0	0	0	0	0
65	Izin Pendirian SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat	1	0	0	1	0
66	Izin PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	0	12	12	0	12
67	Izin LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan)	10	9	9	10	9
68	Izin TBM (Taman Belajar Masyarakat)	0	0	0	0	0
69	Izin KBU (Kelompok Belajar Usaha)	0	0	0	0	0
70	Izin KB (Kelompok Bermain)	9	4	4	9	4
71	Izin TPA (Tempat Penitipan Anak)	1	1	1	1	1
72	Izin Pos PAUD	3	7	7	3	7
73	Surat Izin Usaha Mikro Kecil (dihapus)	0	0	0	0	0
74	Izin Badan Hukum Koperasi	0	0	0	0	0
75	Izin Usaha Operasional Simpan Pinjam	0	0	0	0	0
76	TDU (Tanda Daftar Usaha) PKL	0	0	0	0	0
77	IUTM (Izin Usaha Toko Modern)	0	11	11	0	11
78	IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat)	0	0	0	0	0
79	Izin Pembuangan Limbah Cair	3	3	3	3	3
80	Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun	1	5	5	1	5
81	Izin melalui aplikasi OSS		283	283		283
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.903</b>	<b>3.247</b>	<b>3.247</b>	<b>2.903</b>	<b>3.247</b>

Tabel diatas menyebutkan ada 81 jenis ijin, namun ada keterangan ijin yang pada tahun 2017 dihapus, namun tetap dimunculkan karena pelaksanaan ijin diatas dari tahun 2014 s.d. 2018. Pada 2 (dua) tahun terakhir tahun 2016 – 2017 terdapat penurunan dalam penerbitan ijin yang dipengaruhi oleh Pelimpahan Kewenangan Perijinan Ke Kecamatan (PATEN) dan peruntukan RTRW belum jelas dan masih dalam revisi Perda RTRW.

### 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adanya kegiatan penanaman modal memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang, teruma dari dari sektor retribusi pelayanan perijinan. Realisasi pendapatan retribusi selama 5 (Lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Realisasi Pendapatan Retribusi Perijinan Tahun 2017 – 2021**

N0	JENIS PENDAPATAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	IMB	618.750.200	919.773.400	1.035385.000	1.561.213.100	907.560.260
2	Ijin Gangguan (HO)	5.494.731.800	43.200	0	0	0
3	IUJK	-	-	-	-	-
4	Ijin usaha pariwisata	-	-	-	-	-
5	TDP	-	-	-	-	-
6	IUI	-	-	-	-	-
7	SIUP	-	-	-	-	-
8	TDG	-	-	-	-	-
9	TDI	-	-	-	-	-
10	IPI	-	-	-	-	-
11	Ijin Pertambangan	-	-	-	-	-
12	LEGES	-	-	-	-	-
13	DENDA	4.131.300	114.500	2.119.880	21.184.550	5.711.252
14	Trayek	16.365.000	17.680.000	13.895.000	11.180.000	12.560.000
15	Jasa Giro Bendahara	-	-	-	-	-
16	IMTA	286.198.320	618.217.800	426.248.000	765.930.000	561.075.600
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.420.176.620</b>	<b>1.555.828.900</b>	<b>1.477.647.880</b>	<b>1.486.907.112</b>	<b>1.478.316.852</b>

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi pada tahun 2021 mengalami penurunan, sebagaimana halnya dengan jumlah pelayanan perijinan tahun 2020 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penerbitan ijin berbanding lurus dengan penerimaan pendapatan.

Dari data tersebut diatas dapat diketahui tingkat pertumbuhan PAD dari sektor retribusi perijinan yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.6 Pertumbuhan Pendapatan Retribusi Perijinan  
Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2021**

NO	TAHUN	Realisasi Pendapatan	Pertumbuhan	
			Rp	(% )
1	Tahun 2017	6.420.176.620	1.243.527.473	24,02%
2	Tahun 2018	1.555.828.900	(4.864.347.720)	-324,23%
3	Tahun 2019	1.477.647.880	1.349.613.000	125,93%
4	Tahun 2020	2.359.507.650	2.216.000.000	
5	Tahun 2021	1.486.907.112	2.200.000.000	

Adapun jika dilihat dari tingkat pencapaian targetnya, rata-rata mencapai 110,65 % per tahun.

**Tabel 2.7 Pencapaian Target Pendapatan Retribusi Perizinan**

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	TK CAPAIAN (%)
1	Tahun 2017	4.798.446.500	5.689.255.300	118,56%
2	Tahun 2018	1.781.252.360	2.291.219.757	128,63%
3	Tahun 2019	4.732.667.500	5.176.649.147	109,38%
4	Tahun 2020	6.244.830.000	6.420.176.620	102,8%
5	Tahun 2021	1.200.000.000	1.555.828.900	129,65%

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.**

Berdasarkan analisis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, bahwa pengembangan penanaman modal di Kabupaten Batang memiliki peluang yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari :

1. Besarnya minat calon investor untuk menanam modal di Batang
2. Adanya Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Batang
3. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya dan infrastruktur pendukung penanaman modal yang tersedia.
4. Tersedianya UMKM potensial untuk dikembangkan.

Dengan melihat kondisi tersebut diatas, tentunya Kabupaten Batang memiliki peluang. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya tantangan yang menghadang.

Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan OPD antara lain :

1. Adanya persaingan antar daerah yang sangat kompetitif.

2. Kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap minat investasi di suatu daerah
3. Perlu adanya revisi Perda RTRW (Perlu menetapkan kawasan Industri);
4. Perlu Pembangunan Infrastruktur (Pelabuhan, Jalan dan Jaringan Listrik)

Peluang pengembangan Penanaman Modal di Kabupaten Batang saat ini adalah :

1. Adanya Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Batang
2. Adanya PLTU yang beskala Nasional di Kabupaten Batang
3. Minat calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Batang
4. Tersedianya UMKM yang potensial untuk dikembangkan
5. Keberadaan teknologi informasi yang semakin canggih.
6. Destinasi Wisata Pantai dan Alam Pedesaan.

#### **4. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang**

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai pada perubahan renstra 2027-2022 berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP**  
**Kabupaten Batang**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar			Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (milyar)	186,84	198	217,8	240	264	421,09	67.270	14.707,54	9.082,78	350,52	225,37	33.974,75	6.752,77	3.784,49	132,77
				Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang	2.250,00	20	20	20	20	159	40	33	65	64	7,07	200	165	325	320

				Jumlah	14.730,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.150,00	2.903,00	2.236,00	958	6.467,00	7,81	145,15	111,8	47,9	323,35
				Jumlah realisasi	186,84	198	217,8	240	264	421,09	67.270,00	14.707,54	9.082,78	7.560,059,00	225,37	33.974,75	6.752,77	3.784,49	2.863.658,71

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi capaian berdasarkan jumlah realisasi investasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, sedangkan nilai realisasi capaian berdasarkan jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan, hal itu dikarenakan adanya masa Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Nilai realisasi capaian berdasarkan jumlah perusahaan baru yang berinvestasi mengalami peningkatan, lalu terdapat penurunan lagi pada tahun 2021.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis. Adapun permasalahan pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Berkaitan dengan rendahnya kinerja investasi di Kabupaten Batang dikarenakan oleh beberapa hal antara lain :

1. Rendahnya prosentase perusahaan yang berinvestasi di Kab. Batang yang berkorelasi terhadap menurunnya realisasi investasi;
2. Minimnya ketersediaan studi terbaru (update) peluang investasi;
3. Minimnya jumlah regulasi baru atau yang direvisi terkait dengan regulasi pajak, perizinan, insentif, tenaga kerja dan lingkungan;
4. Dalam penyelenggaraan PTSP masih terdapat beberapa kelemahan antara lain :
  - a. Belum tersedianya informasi di bidang penanaman modal minimal dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris .
  - b. Belum memiliki SDM yang menguasai bahasa Inggris.
  - c. Belum mendapat ISO 9001-2000 terkait sistem manajemen mutu dan kualitas pelayanan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan” maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sesuai dengan tugas dan fungsinya akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan kecakapan dan kemandirian pemuda dalam berwirausaha, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pemuda di Kabupaten Batang untuk mendukung misi tersebut. Dengan adanya pelatihan yang diselenggarakan DPMPTSP Kabupaten Batang diharapkan akan meningkatkan kecakapan dan kemandirian pemuda di Kabupaten Batang dalam berwirausaha.
2. Untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut, telah direncanakan jenis pelatihan apa saja yang akan diselenggarakan pada DPMPTSP Kabupaten Batang baik yang dilaksanakan secara langsung oleh dinas maupun yang diselenggarakan di BLK.
3. Pelaksanaan rekrutmen calon peserta pelatihan dilaksanakan melalui online dan manual, dalam pelaksanaan rekrutmen calon peserta dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan, sehingga didapatkan peserta pelatihan yang benar-benar siap untuk dilatih dan siap melaksanakan perubahan, sehingga akan tercipta pemuda berwirausaha.

Selain misi kedua Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang juga mendukung misi ketiga yaitu meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan, dengan tujuan membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur, dengan sasaran meningkatkan jumlah nilai invesatsi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang, adapun indikatornya a) Jumlah realisasi nilai investasi; dan Rasio daya serap tenaga kerja, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang sesuai dengan tugas dan fungsinya akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang baik dan efektif, maka salah satunya dengan menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk memberikan pelayanan perijinan yang efektif dan efisien. Dengan sistem ini, maka pengurusan perijinan akan lebih mudah dan cepat, karena pengurusan pelayanan perijinan sejak

penerimaan berkas permohonan sampai dengan diterbitkannya dokumen perijinan cukup dilakukan di satu tempat.

2. Untuk menyelenggarakan perijinan satu pintu, telah dilakukan pendelegasian kewenangan penandatanganan perijinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Batang No. 22 Tahun 2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang.
3. Promosi Investasi, melalui even-even pameran di berbagai wilayah.
4. Penyusunan kebijakan yang pro investasi

Semua itu dilakukan dengan harapan agar dapat menarik investasi di Kabupaten Batang, dan jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Batang meningkat. Namun didalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh, sehingga berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih:

1. Minimnya dukungan infrastruktur penunjang penanaman modal.
2. Kondisi sosial masyarakat yang kurang pro investasi
3. Kurangnya promosi investasi
4. Belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal dan perizinan.

### **3.2 Telaahan Renstra**

Sasaran yang ingin dicapai dalam jangka menengah adalah :

1. Meningkatkan minat untuk berinvestasi oleh Perusahaan Besar di Kabupaten Batang dan terbukanya lapangan pekerjaan.

Adanya minat investasi di Kabupaten Batang dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang melakukan investasi di Kabupaten Batang. Hal itu dapat terwujud jika iklim investasinya mendukung, seperti kondisi keamanan, kondisi sosial masyarakat, kondisi infrastruktur, kebijakan pemerintah yang pro investasi.

Adanya investasi, diharapkan akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kabupaten Batang, sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah tenaga kerja yang terserap.

2. Meningkatnya nilai realisasi investasi dan meningkatnya kepemilikan ijin usaha.

Dengan adanya investasi di Kabupaten Batang, maka diharapkan realisasi investasi akan meningkat. Hal ini dapat dilihat dari indikator jumlah realisasi investasi.

3. Meningkatnya kepemilikan ijin usaha, menunjukkan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki ijin usaha yang legal yang berakibat pada peningkatan kegiatan ekonomi dan berdampak pula pada penerimaan PAD Kabupaten Batang. Meningkatnya kepemilikan ijin usaha dapat dilihat dari indikator jumlah ijin yang diterbitkan.
4. Terinformasikannya potensi/peleuang investasi Kabupaten Batang.  
Dengan adanya Potensi/peleuang investasi Kabupaten Batang, maka diharapkan memiliki data potensi/peleuang investasi yang *up to date*, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan dan memberikan informasi bidang penanaman modal.  
Untuk mencapai sasaran tersebut, tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi baik faktor internal maupun eksternal yang dapat dilihat dari tabel.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal, serta Informasi Pelayanan Pengaduan harus didukung dengan rencana tata ruang yang sesuai dengan peruntukannya, RTRW Kabupaten Batang masih dalam revisi. Untuk mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal, dibutuhkan kawasan industri guna meningkatkan investasi di Kabupaten Batang.

### **3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu strategis pada urusan non pelayanan dasar penanaman modal :

1. Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Batang dikarenakan kurang optimalnya dukungan iklim investasi seperti kepastian hukum, insentif investasi, kondisi infrastruktur, kebijakan/regulasi yang pro investasi serta adanya pandemi Covid 19 yang membuat tertundanya investasi.
2. Belum optimalnya kerjasama antar daerah dan antar lembaga terkait dalam melakukan promosi dan pengembangan penanaman modal.
3. Rendahnya jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang, dikarenakan RTRW masih dalam revisi.

Permasalahan dan isu strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih terbatasnya SDM aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang menguasai informasi dan teknologi, sistim aplikasi pelayanan perizinan, Online Single Submission (OSS) serta operator SIPID, SPIPISE dan lain sebagainya.	Belum optimalnya implementasi sistem informasi dan pelayanan perizinan secara online termasuk pelaksanaan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS); SIPID, SPIPISE dan lain sebagainya.	Kurangnya anggaran untuk Bimtek ASN Pengelola Pelayanan Perizinan
2.	Belum optimalnya promosi potensi daerah melalui informasi dan penyajian bahan pameran serta data penunjang lainnya	Kurangnya informasi potensi daerah	Masih terbatasnya anggaran untuk promosi potensi daerah

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang tertuang dalam Misi 1 (satu) yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan tata kelola pemerintahan berbasis Smart City yang didukung pengembangan kerjasama dan Misi 3 (tiga) yaitu ‘Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan’ Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang mempunyai tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan tersebut merupakan implementasi pernyataan yang berpijak pada isu-isu dan analisis strategis serta mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan program maupun kegiatan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

#### **4.1. Tujuan 1**

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indicator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat

**Sasaran :**

**Meningkatnya Kinerja dan akuntabilitas DPMPTSP Kabupaten Batang.**

Dengan indikator :

Nilai Sakip DPMPTSP

- a. Meningkatnya kapasitas pegawai dan dukungan operasional pelaksanaan tugas pegawai.
- b. Meningkatnya kualitas perencanaan program, pengelolaan administrasi dan keuangan

Program :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Dengan indikator :

- a. Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan
- b. Cakupan layanan operasional kantor
- c. Persentase capaian kinerja program Dinas DPMPTSP
- d. Persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan
- e. Persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan Dinas DPMPTSP

Kegiatan :

1. Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Dengan indikator :

- Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun
2. Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah  
Dengan indikator :  
Jumlah laporan keuangan yang disusun
  3. Terlaksananya administrasi dan pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah  
Dengan indikator :  
Jumlah barang asset dan sarpras yang dibeli, laporan barang milik daerah yang disusun
  4. Terlaksananya administrasi kepegawaian dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  
Dengan indikator :  
Jumlah SK / dokumen kepegawaian, jumlah penyediaan jasa pelayanan umum dan jasa lainnya yang disusun.
  5. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah  
Dengan indikator :  
Jumlah peralatan yang dibeli, jumlah peserta rapat koordinasi, jumlah arsip yang dikelola.
  6. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah  
Dengan indikator :  
Jumlah kendaraan yang dipelihara, jumlah peralata dan perlengkapan yang diperbaiki, bangunan gedung bangunan dan sarpras yang dipelihara.

#### 4.2. Tujuan 2

Meningkatkan realisasi nilai investasi dengan indikator tujuan Pertumbuhan nilai investasi

**Sasaran :**

**Meningkatnya jumlah nilai investasi PMA, PMDN serta Investor berskala nasional (PMA/PMDN) di Kabupaten Batang.**

Dengan indikator :

1. Jumlah nilai Realisasi investasi PMA/PMDN

Program :

1. **Program pengembangan iklim penanaman modal** dalam rangka terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif.

Dengan indikator :

Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDA)

Kegiatan :

- a. Terlaksananya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal  
Dengan indikator : Jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan
- b. Tersusunnya rencana umum penanaman modal  
Dengan indikator : jumlah dokumen perencanaan pengembangan penanaman modal yang disusun
- c. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif dan kemudahan penanaman modal  
Dengan indikator : Jumlah laporan hasil evaluasi
- d. Tersedianya peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota  
Dengan indikator : Jumlah pelaksanaan pameran investasi

**2. Program promosi penanaman modal** dalam rangka meningkatnya promosi penanaman modal

Dengan indikator :

Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang

Kegiatan :

- a. Terlaksananya promosi penanaman modal  
Dengan indikator : Jumlah promosi penanaman modal
- b. Tersusunnya strategi promosi penanaman modal  
Dengan indikator : Jumlah promosi/ pameran yang ditetapkan

**3. Program pelayanan penanaman modal** dalam rangka meningkatnya pelayanan penanaman modal

Dengan indikator : Jumlah izin usaha yang diterbitkan.

Kegiatan :

- a. Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik  
Dengan indikator : jumlah ijin yang diterbitkan
- b. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitasi/insentif daerah  
Dengan indikator : Jumlah UMKM yang difasilitasi dan perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang
- c. Terlaksananya system pelayanan informasi perijinan secara elektronik (SPIPISE)  
Dengan indikator : jumlah ijin yang dikeluarkan

**4. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal** dalam rangka meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Dengan indikator :

Jumlah perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal

Kegiatan :

- a. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal

Dengan indikator : Jumlah perusahaan yang terpantau

- b. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal

Dengan indikator : jumlah perusahaan yang dibina

- c. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Dengan indikator : Jumlah perusahaan yang dikoordinasikan

**5. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal** dalam rangka meningkatnya ketersediaan data dan sistem informasi penanaman modal

Dengan indikator :

Prosentasi data dan informasi penanaman modal yang tersedia

Kegiatan :

- a. Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

Dengan indikator : Jumlah layanan aduan masyarakat

- b. Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi

Dengan indikator :

Jumlah sistem informasi penanaman modal, jumlah laporan IKM yang tersusun

**Tabel 4.1**

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN						Total
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,01	87,5	88	88,5	88,75	89	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPMPTSP	Nilai Sakip DPMPTSP	65	70	70	70	75	75	
2	Meningkatkan Realisasi nilai Inventasi	Pertumbuhan nilai Investasi (%)	100	100	66	75	80	83	Meningkatnya jumlah nilai investasi PMA, PMDN serta investor berskala nasional (PMA/PMDN)	Jumlah nilai realisasi Investasi (PMA/PMDN)	7.560 Trilyun	1 Trilyun	1.500 Trilyun	2 Trilyun	2,5 Trilyun	3 Trilyun	17,560 Trilyun

**Tabel 4.2**  
**Sasaran Dan Program Jangka Menengah**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN					PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN					Bidang				
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026					
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas DPMPTSP	Nilai Sakip DPMPTSP	70	70	70	75	75	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	20	50	50	70	70					
									Cakupan layanan operasional kantor	70	75	90	95	100					
									Prosentase capaian kinerja program DPMPTSP	95	95	95	95	95					
									Prosentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	90	92	93	95	95					
									Prosentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPMPTSP	95	95	95	95	95					
2	Meningkatnya jumlah nilai investasi PMA, PMDN serta investor berskala nasional	Jumlah nilai realisasi investasi PMA/PMDN	1 Trilyun	1.500 Trilyun	2 Trilyun	2,5 Trilyun	3 Trilyun	Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional							PM			
									Program promosi penanaman modal	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di kab. Batang								PM	
									Program pelayanan penanaman modal	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	2700	2750	2800	2850	3000			Perizinan	
									Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal									PM
									Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Prosentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia									

**Tabel 4.3**  
**Program Dan Kegiatan Jangka Menengah**

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM					KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KINERJA KEGIATAN					Bidang
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Prosentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	20	50	50	70	70	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	5	5	5	5	Sekretariat
		Cakupan layanan operasional kantor	70	75	90	95	100	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	2	2	2	2	2	Sekretariat
		Prosentase capaian kinerja program DPMPTSP	95	95	95	95	95	Terlaksananya administrasi pengadaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah barang aset dan sarpras yang dibeli	71	168	88	2	19	Sekretariat
									Laporan barang milik yang disusun	2	2	2	2	2	Sekretariat
		Prosentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	90	92	93	95	95	Terlaksananya administrasi kepegawaian dan jasa penunjang urusan pemerintah	Jumlah SK/dokumen kepegawaian	16	25	11	10	10	Sekretariat
									Jumlah penyedia jasa pelayanan umum	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	Sekretariat
		Prosentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPMPTSP	95	95	95	95	95	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah peralatan yang dibeli	71	168	88	2	19	Sekretariat
									Jumlah peserta rapat koordinasi	12	12	12	12	12	Sekretariat
									Jumlah arsip yang dikelola	1.958	1.900	1.701	1.700	1.700	Sekretariat

								Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah kendaraan yang dipelihara	21	21	21	21	21	Sekretariat
									Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	368	240	268	268	268	Sekretariat
									Jumlah bangunan gedung dan sarpras yang dipelihara	369	241	69	369	369	Sekretariat
2	Program pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah investor berskala nasional PMA/PMDN						Terlaksananya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan						PM
								Tersusunnya rencana umum penanaman modal	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan penanaman modal yang disusun						PM
								Tersedianya peta potensi dan peluang usaha kab/kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersedia						PM
								Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah laporan hasil evaluasi						PM
3	Program promosi penanaman modal	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kab. Batang						Terlaksananya promosi penanaman modal	Jumlah promosi penanaman modal						PM

								Tersusunnya strategis promosi penanaman modal	Jumlah promosi/pameran yang ditetapkan						PM
4	Program pelayanan penanaman modal	Jumlah izin usaha yang diterbitkan	2.700	2.750	2.800	2.850	3000	Tersedianya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah izin yang diterbitkan	2.700	2.750	2.800	2.850	3000	Perizinan
								Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah UMKM yang difasilitasi dan perusahaan yang berinvestasi di Kab. Batang						Perizinan
5	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal						Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dipantau						PM
								Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dibina						PM
								Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah perusahaan yang dikoordinasikan						PM
6	Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Prosentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	100	100	100	100	100	Terlaksananya layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu	Jumlah layanan aduan masyarakat	5	5	5	5	5	SI

								perizinan dan non perizinan							
								Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Jumlah system informasi penanaman modal	1	1	1	1	1	SI
									Jumlah laporan IKM yang tersusun	1	1	1	1	1	SI

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan serta Sasaran yang tepat berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi investasi
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur bidang penanaman modal.
3. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan PTSP dan Mal Pelayanan Publik.
4. Meningkatkan ketersediaan informasi penanaman modal.
5. Teratasinya pengaduan Masyarakat terkait kendala atau pengaduan yang timbul dari dampak Perijinan dan Non Perijinan.
6. Semakin mudahnya akses Informasi dan data Bagi masyarakat

Adapun kebijakan yang ditempuh dalam upaya mencapai sasaran yang diinginkan adalah :

1. Promosi investasi melalui event pameran maupun bussiness gathering.
2. Mendorong terwujudnya kemitraan usaha.
3. Optimalisasi Teknologi Informasi sebagai sarana promosi
4. Penyelenggaraan Bintek bidang Penanaman modal.
5. Penyusunan kebijakan yang pro investasi.
6. Penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan.
7. Sosialisasi kebijakan Penanaman Modal dan Perijinan.
8. Kajian/Up Dating potensi/pejuang investasi.
9. Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi

Dibawah ini adalah tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

No.	VISI	: (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)							
	MISI I	: (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)							
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2017	2018	2019	2020	2021
1			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	✓	✓	✓	✓	✓
				Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	✓	✓	✓	✓	✓
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	✓	✓	✓	✓	✓
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	✓	✓	✓	✓	✓
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	✓	✓	✓	✓	✓

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	✓	✓	✓	✓	✓
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	✓	✓	✓	✓	✓
			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Penyediaan Peta Potensi dan peluang Usaha Kabupaten/ Kota	✓	✓	✓	✓	✓
			<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Penyelenggaraan strategi promosi Penanaman Modal	✓	✓	✓	✓	✓
			<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓
				Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	✓	✓	✓	✓	✓
				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	✓	✓	✓	✓	✓
			<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Koordinasi dan Sinkronasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	✓	✓	✓	✓	✓
				Koordinasi dan Sinkronasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	✓	✓	✓	✓	✓

			<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	✓	✓	✓	✓	✓
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang yaitu “meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan”, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang melaksanakan 6 (dua) program yang terdiri dari 5 (lima) program, merupakan program Prioritas Penanaman Modal dan 1 (satu) merupakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, merupakan pendukung dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut ;

#### **A. Belanja Langsung**

##### **1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :**

- a. Penetapan Pemberian fasilitasi / Intensif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;
- b. Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi

##### **2. Program Promosi Penanaman Modal :**

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;

##### **3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:**

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten /Kota .

##### **4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :**

- a. Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota;

##### **5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

- a. Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kota;

##### **6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :**

- a. Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- b. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional;
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional;
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.

##### **7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

**8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :**

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

**B. Belanja Tidak Langsung**

Program gaji Pegawai

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 6.1**  
**Rencana dan Program, Kegiatan dan Pendanaan DPMPTSP**  
**Kabupaten Batang**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan 1			Non Urusan														
	Sasaran 1	17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													DPMPTSP	Batang
				Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	99	100	6.000.000	98	6.000.000	100	6.000.000	100	6.000.000	100			
				persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	99	100	2.948.975.547	98	2.947.508.523	100	2.947.508.523	100	2.947.508.523	100			
				cakupan layanan operasional kantor	99	100	751.019.500	98	814.868.700	100	629.868.700	100	659.868.700	100			
				Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	-	3	25.000.000	3	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	100			

				persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	99	100	962.513.474	98	724.007.139	100	695.726.555	100	741.443.505			
		02.18	Penanaman Modal													
	Sasaran 2	02.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				-		40.000.000		30.000.000		30.000.000			DPMPTSP Batang
				Persentase peningkatan jumlah investor	15	20		40		60		80		80		
		02.18.03	Program Promosi Penanaman Modal				82.800.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000			DPMPTSP Batang
				Persentase promosi di kabupaten Batang	100	100		100		100		100		100		
		02.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal				776.818.250		700.000.000		630.000.000		570.000.000			DPMPTSP Batang
				Persentase ijin yang diterbitkan	100	100		100		100		100		100		
		02.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				413.063.700		433.716.885		455.402.729		478.172.866			DPMPTSP Batang
				Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	7	7		7		8		8		8		
		02.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman				130.346.400		80.000.000		80.000.000		80.000.000			DPMPTSP Batang

			Modal														
				Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	45	45		45		45		45		45			
				<b>Jumlah</b>			<b>6.096.536.871</b>										

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal mengacu pada Indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten Batang yang telah ditetapkan dalam RPJM 2023 – 2026. Adapun penetapan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 – 2026**

No	Indikator	Kondisi Awal periode RPJM	TARGET CAPAIAN TIAP TAHUN					Kondisi Akhir Periode RPJM
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Junlah Nilai Sakip DPMPTSP	65	70	70	71	75	75	75
2.	Jumlah realisasi nilai investasi	7.560 Trilyun	1,5 Trilyun	1,5 Trilyun	1,5 Trilyun	1,5 Trilyun	1,5 Trilyun	1,5 Trilyun

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagai acuan bagi seluruh aparat Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dalam menyusun, merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal periode Tahun 2023 – 2026.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan urusan penanaman modal, tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen RENSTRA, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, Sehingga melalui investasi dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya misi ke-3 yaitu “Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan” . Dengan demikian, harapan “**Terwujudnya Kabupaten Batang yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Agamis, Tenteram dan Sejahtera pada Tahun 2026**” dapat tercapai.

## LAMPIRAN